



Rilis Pers

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Kendali Memusat, Perlindungan Menipis

Jakarta, 22 Oktober 2026 – Dua tahun pertama Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan satu pola yang sama di empat bidang yang dievaluasi Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45): politik media, ekonomi politik, gender, serta politik, hukum, dan keamanan. Anggaran dan kewenangan berpindah ke pemerintah pusat dan program unggulan. Sementara itu, fungsi yang melindungi warga sehari-hari, layanan daerah, lembaga perlindungan korban, dan komunikasi saat krisis, menyusut.

Empat pasang angka memperlihatkan pola itu:

- **Fiskal.** Porsi Transfer ke Daerah (TKD) turun dari 24,7 persen belanja negara pada 2025 menjadi 18,0 persen pada APBN 2026, penurunan satu tahun terbesar dalam dua dekade. Pada tahun yang sama, negara menganggarkan bunga utang Rp599,4 triliun, lebih dari empat perlima seluruh TKD. Sebanyak 153 pemerintah daerah tidak menerima DAK Fisik sama sekali.
- **Pertahanan.** Sejak Agustus 2025, Presiden meresmikan 366 satuan baru TNI. Realisasi belanja fungsi pertahanan 2025 mencapai Rp348,58 triliun, lebih dari dua kali pagu APBN. Namun, kebutuhan yang sudah direncanakan, yakni pesawat peringatan dini dan pengganti 36 jet tempur F-15, belum memiliki kontrak.
- **Pelindungan perempuan.** Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2025, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 2027 hanya sekitar Rp187 miliar, sepertiga lebih rendah dari realisasi 2025 sebesar Rp282 miliar. Badan Gizi Nasional memperoleh Rp240,2 triliun dalam APBN 2027.
- **Komunikasi publik.** Anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) 2027 yang disetujui DPR secara prinsip mencapai Rp1,954 triliun, naik 77 kali lipat dan sekitar sepuluh kali pagu KemenPPPA. Total blunder komunikasi pejabat turun dari 163 menjadi 140, tetapi blunder Presiden naik dari 32 menjadi 48.

“Negara tidak sedang absen,” kata Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB 45. “Ia hadir besar-besaran di panggung program, tetapi menipis di ruang-ruang tempat warga sebenarnya hidup: dana daerah yang dijamin rumus undang-undang, layanan bagi korban kekerasan, dan kesediaan mendengar ketika bencana datang. Persoalannya bukan niat, melainkan desain. Dalam desain yang memusat, yang paling mudah dipangkas selalu yang paling tidak terlihat.”

Menurut Jaleswari, pola yang sama tampak pada cara negara menyalurkan kesejahteraan. “Kesejahteraan makin sering diantarkan lewat rantai komando. Tentara membangun gerai koperasi, polisi mengelola dapur gizi. Di atas kertas jalur ini tampak cepat. Namun, kesejahteraan yang diantarkan lewat komando menempatkan warga sebagai penerima, bukan sebagai subjek republik. Ia juga mengikis dua hal sekaligus: kemampuan inti aparat dan kapasitas lembaga sipil yang semestinya tumbuh untuk mengerjakan tugas itu.”

Ia juga menyoroti komunikasi pemerintah. “Anggaran komunikasi bisa dinaikkan puluhan kali lipat, tetapi kepercayaan tidak bisa dibeli. Kepercayaan dirawat dari sesuatu yang lebih murah sekaligus lebih sulit: kesediaan pejabat mengakui keadaan sebelum menjelaskannya. Data kami menunjukkan risiko komunikasi kini memusat di puncak, sementara aturan yang ada belum menetapkan siapa yang berwenang meluruskan.”

LAB 45 juga mencatat indikator yang tetap terjaga. Ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, inflasi September 2026 berada pada 3,28 persen, dan Indeks Ketimpangan Gender serta angka kematian ibu terus turun. “Itu kerja nyata, dan kami mencatatnya,” ujar Jaleswari. “Namun, perbaikan indikator gender melanjutkan tren sebelum 2024, dan stabilitas makro adalah titik berangkat, bukan tujuan. Di balik angka-angka itu ada 153 daerah yang kehilangan dana pembangunan fisik, korban kekerasan yang menunggu didampingi, dan pengungsi yang menunggu negara berbicara apa adanya. Ukuran sebuah pemerintahan ada di sana.”

Sisa tiga tahun masa pemerintahan cukup untuk mengoreksi arah. LAB 45 menilai koreksi itu dapat diukur dari empat keputusan dalam dua belas bulan ke depan:

1. apakah Perpres Rincian APBN 2027 memuat DAK Fisik per daerah dan menghitung Dana Bagi Hasil sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
2. apakah pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) baru ditunda sampai kebutuhan dan biayanya diuji secara terbuka;
3. apakah tambahan anggaran Bakom diikat pada protokol komunikasi krisis yang menetapkan siapa berbicara dan kapan; dan
4. apakah lembaga perlindungan perempuan memperoleh batas bawah anggaran yang tidak bisa dipangkas atas nama efisiensi.

“Indonesia Emas 2045 tidak diukur dari seberapa besar negara tumbuh di pusat,” kata Jaleswari, “tetapi dari seberapa jauh ia sampai kepada warga yang paling jauh dari pusat.”

Rincian temuan, rekomendasi kepada pemerintah dan DPR, serta lampiran data setiap bidang tersaji pada bagian berikut.

Jaleswari Pramodhawardani

Kepala Laboratorium Indonesia 2045

I. Evaluasi Bidang Politik Media

Blunder Berkurang, tetapi Memusat di Puncak¹

LAB 45 mencatat 303 blunder komunikasi pejabat kabinet sepanjang 20 Oktober 2024–19 Oktober 2026. Jumlahnya turun dari 163 pada tahun pertama menjadi 140 pada tahun kedua. Namun, blunder Presiden naik dari 32 menjadi 48, sehingga persinya naik dari 19,6 persen menjadi 34,3 persen. Dengan total 80 blunder, Presiden menjadi penyumbang terbesar; menteri dan wakil menteri menyumbang 164.

Pergeseran ini lebih penting daripada jumlahnya. Dalam pemerintahan yang menjadikan suara Presiden sebagai rujukan utama, kekeliruan di puncak tidak punya peredam. Tidak ada lapisan di bawahnya yang berwenang, atau berani, meluruskannya.

Krisis menguji setiap kalimat

Ironisnya, jumlah blunder meningkat saat rakyat membutuhkan sosok pemimpin. Pada Desember 2025 tercatat terjadi 27 blunder, angka bulanan tertinggi selama dua tahun. Disusul oleh Agustus 2025 dengan 23 blunder dan Februari 2025 dengan 21 blunder. Bulan Desember 2025 bertepatan dengan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut situasi banjir hanya mencekam di media sosial², sementara pada 10 Desember 2025 Presiden Prabowo menyatakan pemerintah telah menangani bencana “dengan baik”. Hari itu BNPB mencatat 969 korban jiwa dan hampir 900 ribu warga mengungsi. Dua bulan kemudian, lebih dari 100 ribu warga masih mengungsi.³

Lonjakan di bulan krisis sebagian mencerminkan makin banyaknya pernyataan pejabat dan sorotan publik. Justru karena itu angka ini penting: krisis adalah saat kalimat pejabat paling diperhatikan, dan saat kekeliruan paling mahal bagi korban.

Selama puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Agustus–Oktober 2026, pejabat tetap menghasilkan 27 blunder, hampir satu blunder setiap tiga hari. Salah satunya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebut asap karhutla murni faktor alam, delapan hari setelah ia dilantik.⁴ Padahal, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup sendiri menulis pada Juli 2026 bahwa sebagian besar karhutla bukan bencana alam murni, melainkan terkait aktivitas

¹ Disiapkan oleh Tim Politik Media LAB 45 (Narahubung: Salma Nihru, salma@lab45.id).

² CNN Indonesia, “Kepala BNPB Minta Maaf Sebut Bencana Banjir Hanya Mencekam di Medsos,” 2 Desember 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251202184857-20-1302022/kepala-bnpb-minta-maaf-sebut-bencana-banjir-hanya-mencekam-di-medsos>.

³ Fathur Rochman, “Prabowo Sampaikan ke Putin Bencana Banjir Ditangani secara Baik,” ANTARA, 10 Desember 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5297863/prabowo-sampaikan-ke-putin-bencana-banjir-ditangani-secara-baik>. Data BNPB per 10 Desember 2025 (969 jiwa; 894.501 pengungsi): Kompas TV, “BNPB Ungkap Jumlah Pengungsi Banjir di Sumut Bertambah 500 Orang,” 10 Desember 2025, <https://www.kompas.tv/nasional/636668/bnpb-ungkap-jumlah-pengungsi-banjir-di-sumut-bertambah-500-orang>. Data pengungsi Februari 2026: NU Online, “Korban Banjir dan Longsor Aceh–Sumatra Capai 1.204 Jiwa, BNPB Kebut Huntara,” 12 Februari 2026, <https://nu.or.id/nasional/korban-banjir-dan-longsor-aceh-sumatra-capai-1-204-jiwa-bnpb-kebut-huntara-AyRvs>.

⁴ Haryanti Puspa Sari dan Robertus Belarminus, “Malaysia–Singapura Dikepung Asap Karhutla, Bakom: Di Luar Human Error, Ini Betul-betul Alam,” Kompas.com, 10 Oktober 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/10/10/16222141/malaysia-singapura-dikepung-asap-karhutla-bakom-di-luar-human-error-ini>.

manusia.⁵ Pernyataan yang menempatkan alam sebagai penyebab tunggal menutup pertanyaan tentang pencegahan dan penegakan hukum, dua hal yang menjadi tanggung jawab negara.

Anggaran naik, ukuran kinerja belum ada

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengusulkan anggaran Bakom naik dari Rp25,37 miliar pada 2026 menjadi Rp1,954 triliun pada 2027 atau naik 77 kali lipat. Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui secara prinsip usulan tersebut sembari meminta rincian alokasi dan indikator kinerja yang terukur. Dana itu dialokasikan untuk “...membentuk sistem, penyiapan sarana dan prasarana kerja, dan kebutuhan lain,” tetapi porsi untuk komunikasi publik belum jelas.⁶ Bakom memang lembaga baru, sehingga lonjakan dari basis kecil dapat dipahami. Yang perlu dijawab adalah ukurannya. Anggaran itu sekitar sepuluh kali pagu indikatif KemenPPPA 2027, sementara lembaga ini sudah dipimpin empat kepala dalam dua tahun terakhir, termasuk saat masih bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selain itu, sebagian belanja komunikasi kementerian juga mengalir ke pemengaruh (influencer). Pada 2026, Kementerian Koperasi menganggarkan Rp1,99 miliar untuk pemengaruh.⁷

Aturan ada, tetapi tidak menunjuk siapa yang meluruskan

Kerangka hukum komunikasi krisis dan komunikasi publik sudah tersedia. Permenpan-RB 29/2011 mewajibkan setiap instansi membentuk tim komunikasi krisis. Peraturan tersebut mewajibkan pesan kunci yang “singkat, jelas, dan tidak defensif”. Inpres 9/2015 menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), kini Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), untuk mengoordinasikan komunikasi publik pemerintah. Peraturan yang lebih baru, yaitu Perpres 174/2024, memandatkan komunikasi publik dan media dalam wewenang Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Perpres 96/2025 menetapkan Bakom sebagai “lembaga nonstruktural untuk mengorkestrasi komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah,” dengan pengorganisasian sekretariat Bakom diatur oleh Kemensetneg melalui Permensetneg 9/2025.

Aturan-aturan tersebut memiliki setidaknya tiga kelemahan. Pertama, regulasinya tumpang-tindih. Inpres 9/2015 menunjuk Kemenkominfo (kini Kemkomdigi) sebagai koordinator, sedangkan Perpres 96/2025 memberi Bakom fungsi serupa. Ketika semua berwenang berbicara, tidak ada yang berwenang meluruskan, termasuk meluruskan Kepala Bakom sendiri. Kedua, Permenpan-RB 29/2011 hanya berlaku di lingkungan masing-masing instansi. Pedoman tersebut tidak mengatur kapan menteri, menteri koordinator, atau Presiden wajib berbicara. Ketiga, pedoman tersebut belum dijalankan secara optimal. Studi terhadap 23 praktisi humas

⁵ Eduward Hutapea, “Mengapa Kebakaran Hutan dan Lahan Selalu Terjadi?,” Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, 1 Juli 2026,

<https://kemenlh.go.id/news/detail/mengapa-kebakaran-hutan-dan-lahan-selalu-terjadi>.

⁶ Sultan Abdurrahman, “Dana Bakom Rp 1,9 T. Betulkah buat Memoles Citra Pemerintah?” Tempo, 4 September 2026, <https://www.tempo.co/politik/anggaran-bakom-rp-1-9-t-kepuasan-publik-prabowo-subianto-2285405>.

⁷ Riana A. Ibrahim, “Potensi Korupsi Sistemik’ Koperasi Merah Putih – Dari Anggaran Miliaran untuk Influencer hingga Gaji Pengurus yang Tak Pasti,” BBC News Indonesia, 13 Juli 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy4ex17ek5jo>.

pemerintah pada 2019 menemukan Permenpan-RB 29/2011 belum diterapkan sepenuhnya. Celah ini lebih tua dari pemerintahan sekarang, tetapi kini paling mahal akibatnya.⁸

Rekomendasi

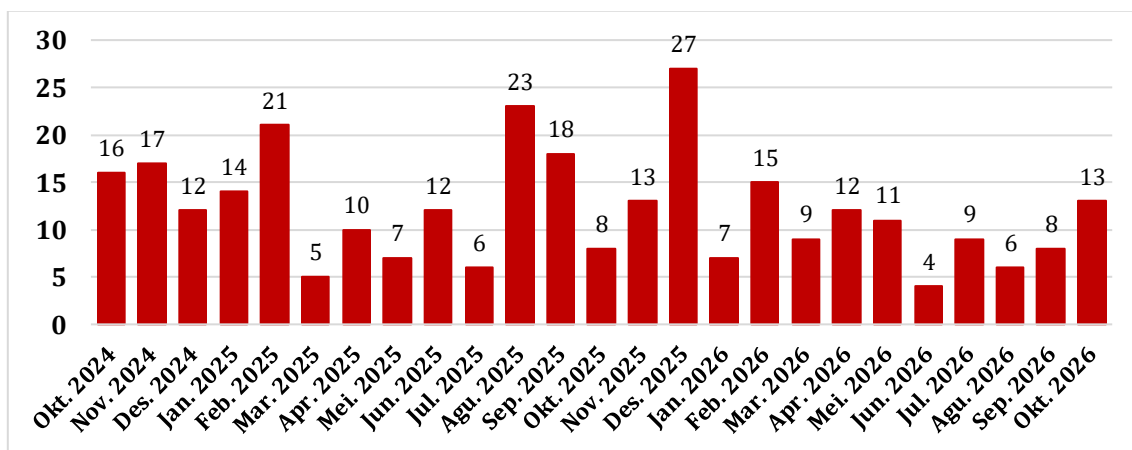
LAB 45 merekomendasikan pemerintah untuk:

1. memperbarui Inpres 9/2015 agar Bakom mengoordinasikan pesan dan Kemkomdigi menyebarluaskan informasi, sedangkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dibantu Kepala Bakom, menjadi juru bicara resmi Presiden, serta menetapkan lima level siaga yang mengatur siapa yang berwenang berbicara pada setiap level;
2. merevisi Permenpan-RB 29/2011 agar pedoman komunikasi krisis setiap instansi memuat pedoman sikap pada Lampiran dan selaras dengan lima level siaga;
3. melakukan harmonisasi regulasi terkait komunikasi publik dan komunikasi krisis agar tidak terjadi tumpang-tindih aturan; dan
4. membuka rincian kontrak pengadaan pemengaruh, serta proyek kehumasan lainnya di Inaproc, termasuk penyedia, nilai, dan keluaran.

Kepada DPR, LAB 45 mendorong agar kepatuhan terhadap lima level siaga dan pedoman sikap menjadi indikator kinerja Bakom dalam pengawasan anggaran 2027 dan pembahasan anggaran 2028.

Lampiran

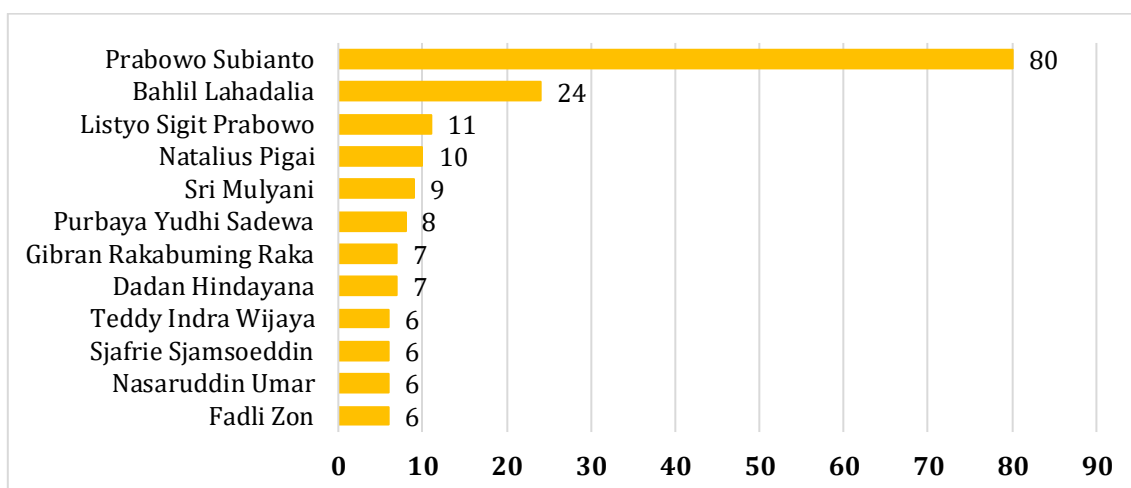
Bagan 1. Lini Masa Blunder



Sumber: LAB 45

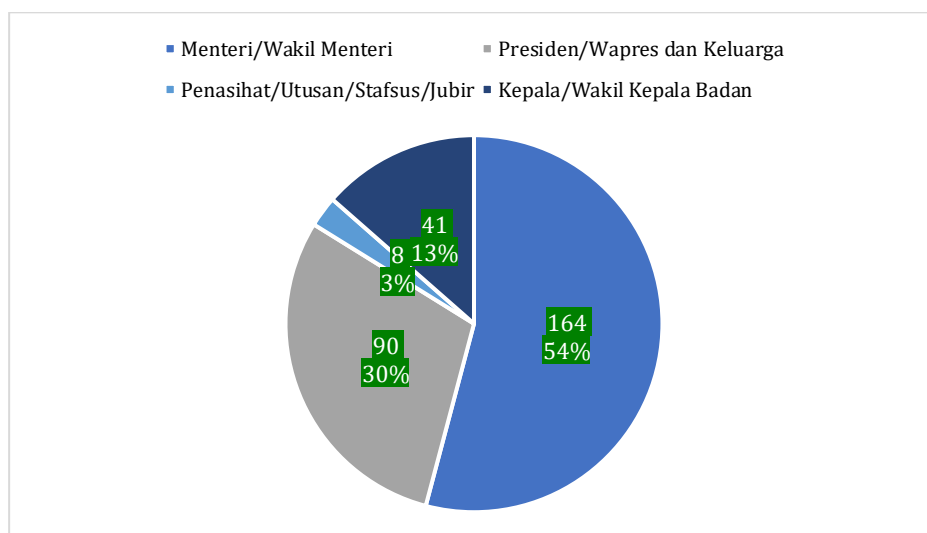
⁸ Rachmat Kriyantono, "The Implementation of Permenpan-RB No 29/2011 in Crisis Management of Government Public Relations," *Jurnal Komunikator* 11, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.18196/jkm.112023>.

Bagan 2. 12 Pejabat dengan Blunder Terbanyak



Sumber: LAB 45

Bagan 3. Blunder berdasarkan Jenis Jabatan



Sumber: LAB 45

Blunder didefinisikan sebagai pernyataan, kebijakan, atau tindakan pejabat pemerintah yang menunjukkan insensitivitas terhadap situasi masyarakat, bersifat kontroversial atau saling bertentangan antarpejabat, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau tidak mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Data dikumpulkan selama periode 20 Oktober 2024–19 Oktober 2026 melalui penelusuran media sosial dan media daring. Media sosial digunakan untuk mengidentifikasi pernyataan atau tindakan yang memicu perhatian dan kritik publik, serta memahami konteks. Sementara itu, media daring ditelusuri untuk memeriksa konteks, perkembangan isu, dan bukti pendukung. Penentuan suatu kasus sebagai blunder dilakukan oleh analis Maha Data dan Politik Media Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) berdasarkan kesesuaiannya dengan sekurang-kurangnya satu kriteria operasional yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Lima Level Siaga Komunikasi Krisis

Level	Situasi	Pihak yang Merespons	Tenggat
1	Isu viral terbatas, tanpa korban	Humas kementerian/lembaga (K/L) terkait	1 × 24 jam
2	Isu sektoral menjadi berita nasional	Juru bicara atau pejabat eselon I K/L; Bakom memantau	1 × 24 jam
3	Isu lintas K/L atau menyangkut keselamatan rakyat	Menteri atau kepala lembaga; Bakom menyatukan pesan; Kemkomdigi menyebarkan	1 × 24 jam, <i>briefing</i> harian
4	Bencana besar, kerusuhan, atau korban jiwa, dan/atau dampak nasional	Menteri koordinator terkait; Mensesneg selaku juru bicara Presiden	1 × 24 jam, <i>briefing</i> dua kali sehari
5	Korban jiwa massal, korban akibat tindakan aparat, dampak nasional dan/atau lintas negara	Presiden secara langsung	Maksimal dalam rentang 24 jam

Respons di setiap level situasi wajib mengikuti pedoman sikap yang sama, antara lain: (1) pejabat menyampaikan empati kepada korban pada kalimat pertama; (2) pejabat meminta maaf karena negara lalai menjalankan kewajiban pada kalimat kedua; (3) pejabat memakai data terverifikasi dari sumber terpercaya; dan (4) pejabat menyebut langkah konkret penanganan beserta tenggat waktu. Sebaliknya, beberapa sikap berikut ini perlu dihindari: (1) pejabat dilarang memakai diksi nirempati seperti “hanya” dan “sebagian kecil”; (2) pejabat dilarang menuding dalang atau pihak lain tanpa bukti; (3) pejabat dilarang menyalahkan alam atau daerah lain; serta (4) pejabat dilarang melabeli pengkritik.

II. Evaluasi Bidang Ekonomi Politik

Pusat Makin Gemuk, Daerah Makin Kurus⁹

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, tetapi memusatkan kendali atas uang negara. Ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 secara tahunan.¹⁰ Inflasi September 2026 berada pada 3,28 persen, masih dalam rentang sasaran Bank Indonesia.¹¹ Di balik stabilitas itu, belanja pemerintah pusat membesar, sementara dana yang dikelola daerah menyusut. Porsi Transfer ke Daerah (TKD) tinggal 18 persen dari belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, dan kenaikan TKD pada APBN 2027 tidak mengubah porsi itu. Pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada 2026 memutuskan dana pembangunan sekolah, air minum, dan sanitasi di banyak daerah.

Pertumbuhan terjaga, belanja pemerintah melonjak

Pada triwulan II 2026, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen, tiga kali laju konsumsi rumah tangga (5,06 persen), terutama karena belanja Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gaji ke-13. Sumbangannya terhadap pertumbuhan masih 1,07 poin persentase, di bawah konsumsi rumah tangga (2,67 poin) dan investasi (2,06 poin) (Gambar 1). Pertanyaannya, apakah ekspansi belanja negara menghasilkan pekerjaan produktif dan memperluas manfaat pertumbuhan?

Nadia Restu Utami selaku Analis Ekonomi LAB 45 menuturkan, “Pertumbuhan yang terjaga merupakan capaian penting, tetapi ukuran keberhasilan fiskal tidak berhenti pada angka produk domestik bruto. Belanja negara harus dinilai dari manfaatnya bagi pekerjaan, produktivitas, dan kebutuhan nyata masyarakat.”

Ketika belanja pusat membesar, daerah menyusut

Arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo menunjukkan kecenderungan resentralisasi yang paling kuat selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2004, realisasi belanja negara mencakup 69,6 persen belanja pemerintah pusat, sedangkan TKD memperoleh 30,4 persen (Gambar 2). Dalam APBN 2026, porsi itu berubah menjadi 82 persen untuk pusat dan 18 persen untuk daerah, turun dari 24,7 persen pada realisasi 2025. Penurunan sekitar 6,7 poin persentase dalam satu tahun itu merupakan yang terbesar dalam dua dekade terakhir.¹² Pergeseran komposisi ini tidak otomatis menunjukkan kualitas belanja yang lebih buruk, tetapi memperlihatkan siapa yang semakin besar menentukan alokasi sumber daya negara.

⁹ Disiapkan oleh Tim Ekonomi Politik LAB 45 (Narahubung: Nadia Restu Utami, nadia@lab45.id).

¹⁰ BPS, Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2026, 5 Agustus 2026, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2605/ekonomi-indonesia-triwulan->

¹¹ BPS, “Inflasi year-on-year pada September 2026 sebesar 3,28 persen,” 1 Oktober 2026, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/10/01/2623/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-september-2026-sebesar-3-28-persen-.html>.

¹² LKPP 2025: realisasi belanja negara Rp3.435,46 triliun, termasuk TKD Rp849,04 triliun (24,7 persen); Bloomberg Technoz, “Postur Pertanggungjawaban APBN 2025, Sejumlah Target Tak Tercapai,” Juli 2026, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113863/postur-pertanggungjawaban-apbn-2025-sejumlah-target-tak-tercapai/2>. Porsi TKD 2026 dihitung dari APBN 2026.

Dari sisi belanja pusat, pemerintah memperbesar kendali atas program prioritas nasional lewat belanja barang dan jasa. Olahan LAB 45 menunjukkan belanja barang dan jasa dalam APBN 2026 mengambil 18,4 persen dari total belanja negara, porsi tertinggi dalam dua dekade terakhir di luar 2021, ketika belanja pemulihan Covid-19 mendorongnya hingga 19 persen (Gambar 3).

Belanja pusat yang membesar itu berjalan bersama beban bunga utang, yang pada 2026 menyerap sekitar 15,6 persen belanja negara atau Rp599,4 triliun (Gambar 3). Jika ekspansi belanja dibiayai utang baru, beban bunga tahun berikutnya dapat naik dan makin mempersempit ruang pemerintah untuk membiayai kebutuhan publik.

Dari sisi belanja daerah, kapasitas pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik menyempit. TKD berkurang dari Rp849 triliun pada realisasi APBN tahun 2025 menjadi Rp693,0 triliun pada APBN 2026, atau turun 18,4 persen (Gambar 4). Pemangkasan paling tajam terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyusut dari Rp168,9 triliun menjadi Rp58,5 triliun, sementara DAK Fisik turun dari Rp17,6 triliun menjadi Rp5 triliun (Gambar 4). Olahan LAB 45 atas Lampiran V Perpres Rincian APBN 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) juga tertekan, termasuk dihapusnya pos khusus dukungan pekerjaan umum dan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah yang sebelumnya mencapai Rp31,04 triliun pada APBN tahun 2025.

Temuan LAB 45 juga menunjukkan pemangkasan itu meniadakan alokasi DAK Fisik untuk sejumlah bidang, seperti pendidikan, irigasi, air minum, dan sanitasi, sehingga 153 pemerintah daerah tidak memperoleh DAK Fisik sama sekali dalam APBN 2026. Penyusutan TKD itu memangkas pembiayaan infrastruktur dasar yang selama ini menopang pelayanan publik.

APBN 2027, yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 2026, menaikkan TKD menjadi Rp735 triliun, tetapi porsinya tetap sekitar 18 persen dari belanja negara. DAK Fisik tetap Rp5 triliun, dan DBH hanya Rp63,4 triliun, jauh di bawah realisasi 2025. Menurut analisis LAB 45, pemangkasan DBH berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pemerintah pusat juga masih menunggak kurang bayar DBH Rp70,2 triliun kepada 413 daerah, dan Rp5 triliun dari Rp18,9 triliun yang diumumkan sebagai bantuan kepada daerah merupakan cicilan tunggakan itu.¹³ Mencampur pelunasan kewajiban lama dengan alokasi baru mengaburkan kepastian hak daerah.

Daerah menanggung beban, masyarakat membayar harga

Penyusutan fiskal daerah berisiko membebani masyarakat. Pemerintah daerah tetap berkewajiban menyediakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai pelayanan dasar, sementara sumber pembiayaannya semakin terbatas. Belanja pegawai dan kewajiban rutin yang bersifat wajib membuat belanja pembangunan menjadi salah satu pos yang paling rentan terhadap penyesuaian. Ketika DAK Fisik menyusut, masyarakat menghadapi risiko tertundanya perbaikan sekolah, pembangunan jalan, jaringan air minum, sanitasi, dan fasilitas kesehatan.

¹³ Dany Saputra, "Pemerintah Pusat Nunggak Bayar DBH Rp70,2 Triliun ke 413 Daerah," *Bisnis.com*, 30 Juli 2026, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20260730/10/1992400/pemerintah-pusat-nunggak-bayar-dbh-rp702-triliun-ke-413-daerah>; Dany Saputra, "'Setengah Hati' Menyambung Napas Fiskal Daerah," *Bisnis.com*, 14 Agustus 2026, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20260814/10/1996178/setengah-hati-menyambung-napas-fiskal-daerah>.

Rekomendasi

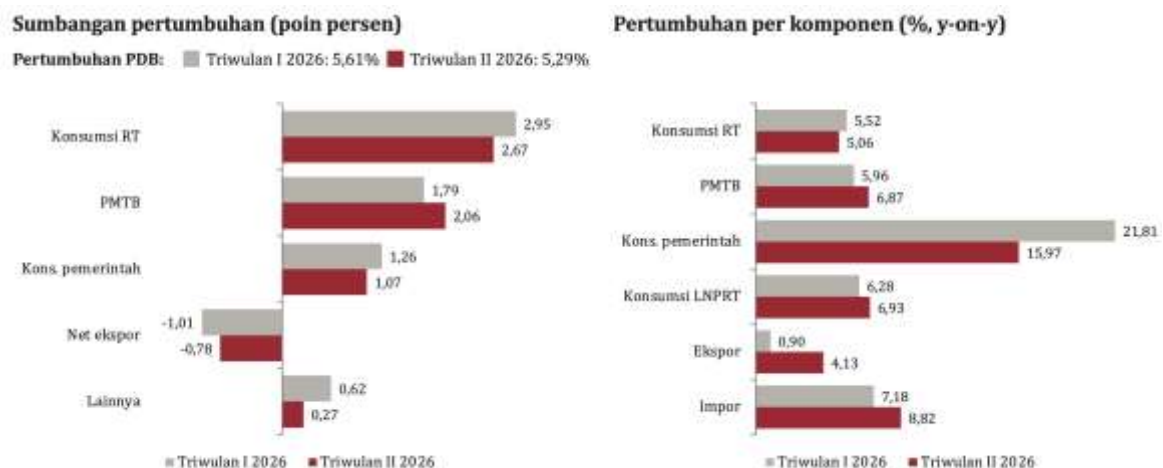
LAB 45 merekomendasikan pemerintah untuk:

1. memulihkan kepastian transfer fiskal, dimulai dengan menghitung DBH 2027 sesuai UU HKPD, melunasi kurang bayar DBH, dan menerbitkan realisasi penyaluran TKD per daerah setiap bulan;
2. melindungi pembiayaan pelayanan dasar daerah, terutama dengan memuat rincian DAK Fisik 2027 (Rp5 triliun) per daerah dan per bidang dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN 2027 serta memprioritaskan daerah yang tidak menerima DAK Fisik pada 2026; dan
3. memastikan program prioritas nasional tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah menjalankan kewenangannya.

Kepada DPR, LAB 45 mendesak Badan Anggaran menjadikan realisasi DAK Fisik dan DBH per daerah sebagai bahan utama pembahasan laporan semester pertama APBN 2027.

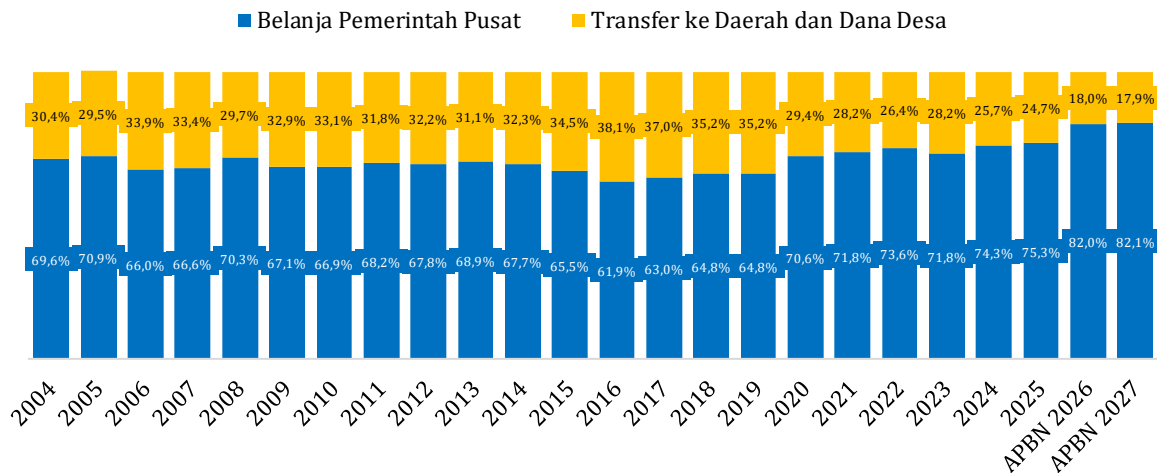
Lampiran

Gambar 1. Sumbangan dan Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I dan II 2026 Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



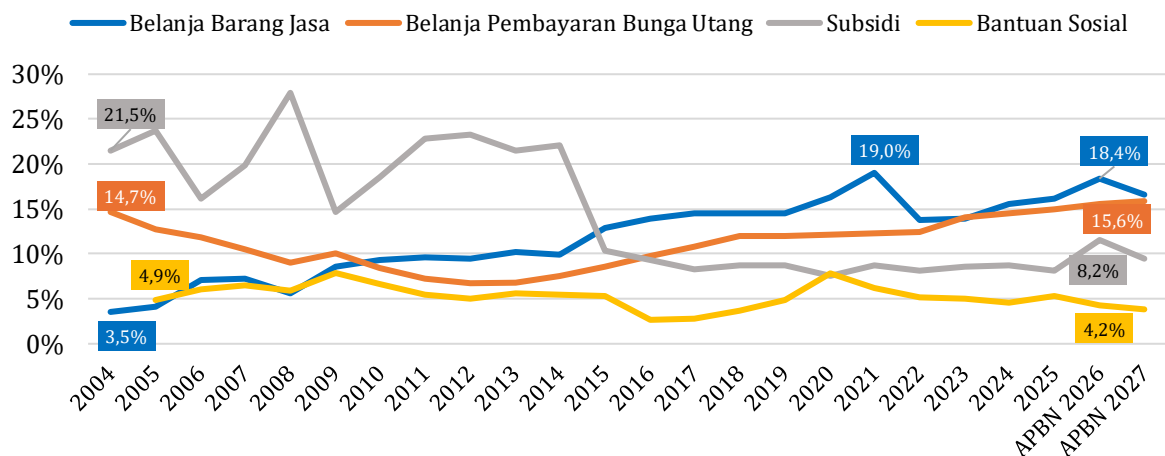
Sumber: BPS (2026)

Gambar 2. Proporsi Belanja Negara



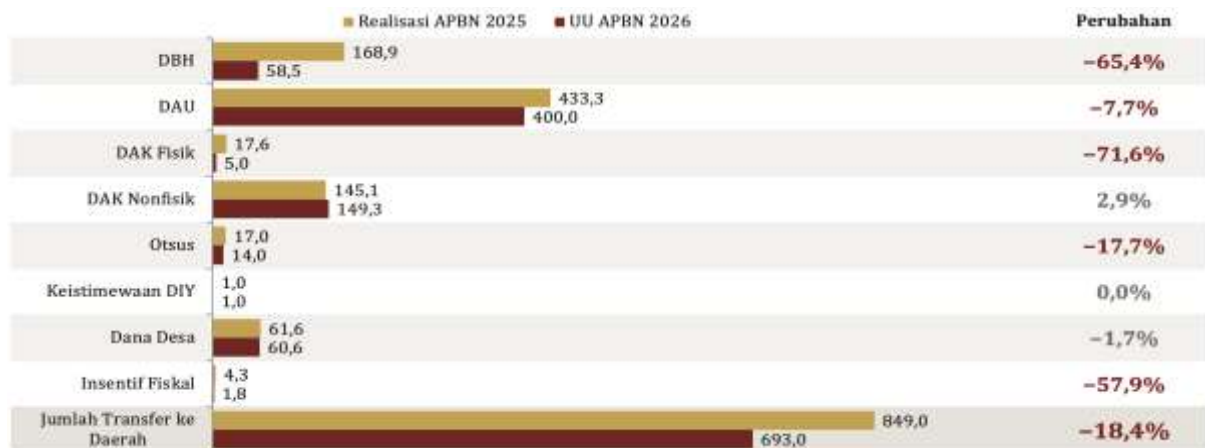
Sumber: LKPP & Nota Keuangan APBN (diolah LAB 45)

Gambar 3. Proporsi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Jenis



Sumber: LKPP & Nota Keuangan APBN (diolah LAB 45)

Gambar 4. Komponen Transfer ke Daerah (TKD) 2025–2026 dalam Triliun Rupiah



Sumber: LKPP & Nota Keuangan APBN (diolah LAB 45)

III. Evaluasi Bidang Gender

Laporan Kekerasan Tertinggi, Anggaran Pelindungan Menyusut¹⁴

Dua tahun berjalan, kebijakan Pemerintahan Prabowo–Gibran menjauh dari janji kesetaraan gender dalam Asta Cita dan RPJMN 2025–2029. Pelindungan, pendanaan, dan suara perempuan dalam kebijakan sama-sama melemah. Indeks Ketimpangan Gender turun menjadi 0,402 dan angka kematian ibu turun menjadi 144 per 100.000 kelahiran hidup, tetapi keduanya melanjutkan tren sebelum 2024. Target penurunan kekerasan seksual belum bisa diukur karena belum ada survei prevalensi baru.

UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga akhirnya disahkan pada April 2026, sekitar 11,5 bulan setelah dijanjikan rampung dalam tiga bulan, dan aturan pelaksanaannya belum terbit. Di kabinet, perempuan mengisi 4 dari 48 kursi menteri.

Beban layanan naik, kapasitas negara turun

Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, naik 14,07 persen dan tertinggi dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 2.707 kasus terjadi di ranah negara, termasuk persekusi oleh aparat dan kekerasan seksual oleh pejabat publik.¹⁵ Kenaikan laporan bisa berarti kekerasan bertambah atau makin banyak korban berani melapor, dan keduanya sama-sama menambah beban layanan negara.

Pada saat yang sama, anggaran KemenPPPA sempat dipangkas dari Rp300,7 miliar menjadi Rp153,8 miliar dalam efisiensi 2025, dengan realisasi akhir Rp282 miliar. Pagu 2026 Rp214,1 miliar, dan pagu indikatif 2027 sekitar Rp187 miliar, sepertiga lebih rendah dari realisasi 2025 dan 42 persen di bawah pagu 2024. KemenPPPA mengusulkan Rp392,5 miliar.¹⁶

Komnas Perempuan hanya disiapkan Rp39,3 miliar untuk 2027, naik menjadi Rp47 miliar setelah ditambah DPR, masih di bawah anggaran 2026 dan kebutuhan Rp54,2 miliar.¹⁷ LPSK, yang juga melindungi korban kekerasan seksual, sempat dipangkas 62,85 persen dalam efisiensi 2025. Ketika layanan negara menyusut, bebannya berpindah ke rumah, ke kerja perawatan tak berbayar yang sebagian besar dipikul perempuan.

Pengakuan negara ikut melemah

¹⁴ Disiapkan oleh Tim Politik Media dan Gender LAB 45 (Narahubung: Aldi Pahala Rizky, pal@lab45.id).

¹⁵ Hukumonline, “Potret Kekerasan terhadap Perempuan yang Terus Meningkat,” Maret 2026 (peluncuran CATAHU Komnas Perempuan, 6 Maret 2026), <https://www.hukumonline.com/berita/a/potret-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-terus-meningkat-lt69b5942da4ab1>.

¹⁶ Merahputih.com, “Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?” 28 Januari 2026 (realisasi 2025 Rp282 miliar; pagu 2026 Rp214,11 miliar), <https://www.merahputih.com/post/amp/anggaran-kementerian-pppa-2026-terjun-bebas-nyawa-perempuan-dan-anak-jadi-taruhan>; ANTARA, “Menteri ajukan tambahan anggaran KemenPPPA Rp392 miliar pada 2027,” 17 Juni 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5612135/menteri-ajukan-tambahan-anggaran-kemenpppa-rp392-miliar-pada-2027>.

¹⁷ Industry.co.id, “Komisi XIII DPR Setujui Pagu Anggaran 10 Mitra Kerja untuk Tahun 2027,” <https://www.industry.co.id/read/156203/komisi-xiii-dpr-setujui-pagu-anggaran-10-mitra-kerja-untuk-tahun-2027>.

Pada Juni 2025, Menteri Kebudayaan meragukan terjadinya pemerkosaan massal Mei 1998, dan penyangkalan itu digugat Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas pada awal 2026. Draf revisi UU Hak Asasi Manusia memuat 21 pasal yang oleh Komnas HAM dinilai bermasalah dan mengatur Komnas Perempuan secara terbatas. Pemerintah menyatakan revisi itu memperkuat lembaga HAM; dampak akhirnya bergantung pada draf yang dibahas DPR.

Dibiayai sebagai ibu, belum sebagai warga

Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh Rp240,2 triliun dalam APBN 2027,¹⁸ atau sekitar Rp1.280 untuk setiap Rp1 pagu KemenPPPA. Kedua lembaga berbeda fungsi, tetapi perbandingan ini memperlihatkan bahwa anggaran besar untuk perempuan terutama mengalir lewat program gizi ibu hamil dan menyusui.

Julia Suryakusuma menyebut pola ini Ibuisme Negara: perempuan dihadirkan dalam kebijakan terutama melalui peran keibuan, bukan sebagai warga yang berhak atas perlindungan, dan struktur anggaran dua tahun terakhir mengikuti pola itu.

Program yang menjadi kanal itu juga bermasalah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 43.838 korban dugaan keracunan MBG di 36 provinsi sejak Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026. Korbannya tidak hanya siswa; di Pati, Jawa Tengah, korban juga mencakup balita peserta posyandu.¹⁹ Setiap anak yang sakit menambah kerja perawatan ibu. Jika pencegahan stunting menjadi alasan utama program, sasarannya meleset: dari Rp240,2 triliun anggaran BGN 2027, sekitar Rp199 triliun dialokasikan untuk peserta didik, padahal stunting dicegah pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN dan dua mantan wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG, sehari setelah ketiganya dicopot Presiden.²⁰ Survei SMRC Juli 2026 mencatat 61,6 persen warga yang mengetahui MBG kurang atau tidak puas dengan pelaksanaannya, naik dari 33,9 persen pada November 2025.²¹

Bencana tanpa data perempuan

Banjir dan longsor Sumatera akhir 2025 menewaskan 1.204 orang dan menyisakan 140 orang hilang (BNPB, Februari 2026); pada puncaknya, lebih dari satu juta warga mengungsi.²² Komnas

¹⁸ Kontan, "BGN Siapkan Anggaran Rp240,2 Triliun pada 2027, Ini Rinciannya," 3 September 2026 (alokasi peserta didik Rp198,96 triliun), <https://nasional.kontan.co.id/news/bgn-siapkan-anggaran-rp2402-triliun-pada-2027-ini-rinciannya>.

¹⁹ Fortune Indonesia, "MBG Memakan 1.642 Korban Keracunan, Pemerintah Didesak Tetapkan KLB," 4 September 2026, <https://www.fortuneidn.com/news/mbg-memakan-1-642-korban-keracunan-pemerintah-didesak-tetapkan-klb-00-ccw2k-y6p71g>; AFU, "Catat 43 Ribu Korban Keracunan, Tokoh Lintas Iman dan MBG Watch Tuntut Penghentian Program Makan Bergizi Gratis," <https://afu.id/nasional/catat-43-ribu-korban-keracunan-tokoh-lintas-iman-dan-mbg-watch-tuntut-penghentian-program-makan-bergizi-gratis>.

²⁰ ANTARA, "Kejagung ungkap sudah pelajari kasus korupsi MBG sejak lama," 4 Juni 2026, <https://jogja.antaranews.com/berita/833161/kejagung-ungkap-sudah-pelajari-kasus-korupsi-mbg-sejak-lama>.

²¹ SMRC, "Program Khusus Presiden: MBG dan KDMP," survei nasional 5–19 Juli 2026, dirilis 28 Juli 2026, https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2026/07/smrc_rilis_2_mbg_kopdes_surnas-Juli-2026.pdf.

²² Kompas TV, "Update Banjir dan Longsor Sumatera: Korban Meninggal Bertambah Jadi 1.204 Jiwa, 140 Orang Hilang," 2 Februari 2026, <https://www.kompas.tv/nasional/648092/update-banjir-dan-longsor->

Perempuan menemukan tidak ada data perempuan, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas untuk distribusi logistik, dan nyaris tidak ada pos pengaduan kekerasan di pengungsian. Pola itu berulang pada karhutla 2026. Hingga akhir Agustus, sekitar 286 ribu hektare lahan terbakar secara nasional, dan per 21 Agustus Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar asap secara langsung.²³ Kerja perawatan bertambah ketika balita sakit dan sekolah beralih daring, sementara perempuan pekerja informal tidak tercatat sebagai terdampak.

Tanpa data terpilah, kebutuhan perempuan korban bencana sulit masuk perencanaan anggaran maupun layanan. Pemerintah tetap menolak status bencana nasional untuk kedua bencana itu, terakhir pada 12 Oktober 2026. Dalam sidang gugatan warga korban banjir Sumatera di PTUN Jakarta pada 15 Oktober 2026, ahli menilai empat dari lima indikator bencana nasional telah terpenuhi.

Rekomendasi

LAB 45 merekomendasikan pemerintah untuk:

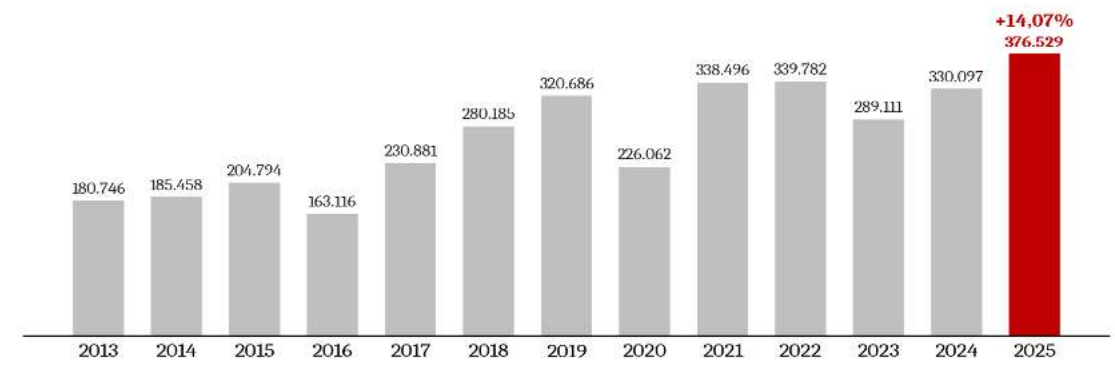
1. menetapkan batas bawah anggaran bagi KemenPPPA, LPSK, Komnas Perempuan, dan DAK Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak agar tidak lagi menjadi sasaran efisiensi;
2. mengakui pemerkosaan massal Mei 1998 sebagai bagian sejarah kelam bangsa dan memulihkan hak korban serta keluarga penyintas;
3. mengevaluasi total program MBG, mulai dari moratorium dapur bermasalah, keterbukaan data keracunan, penempatan ahli gizi dan kesehatan masyarakat di pimpinan BGN, hingga pengusutan tuntas korupsi;
4. mewajibkan data korban bencana terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan disabilitas, serta menyediakan ruang aman dan pos pengaduan di hunian sementara Sumatera dan wilayah terdampak karhutla;
5. menerbitkan aturan pelaksana UU PPRT dan menjaga independensi Komnas Perempuan dalam revisi UU HAM; dan
6. menyusun peta jalan kesetaraan gender 2025–2029 dengan target terukur, disertai audit gender di setiap kementerian dan lembaga.

sumatera-korban-meninggal-bertambah-jadi-1-204-jiwa-140-orang-hilang; Investortrust, “Korban Meninggal Banjir Sumatra Bertambah Jadi 961 Jiwa,” 8 Desember 2025 (1.057.482 pengungsi), <https://investortrust.id/national/87890/korban-meninggal-banjir-sumatra-bertambah-jadi-961-jiwa>.

²³ ANTARA, “Indonesia braces for September as forest fires threaten to spread,” September 2026, <https://kalsel.antaranews.com/berita/533021/indonesia-braces-for-september-as-forest-fires-threaten-to-spread>; RRI, “Komnas HAM Warns of Broader Rights Damage from Forest and Land Fires,” 3 September 2026, <https://rri.co.id/voice-of-indonesia/national/2704351/komnas-ham-warns-of-broader-rights-damage-from-forest-and-land-fires>.

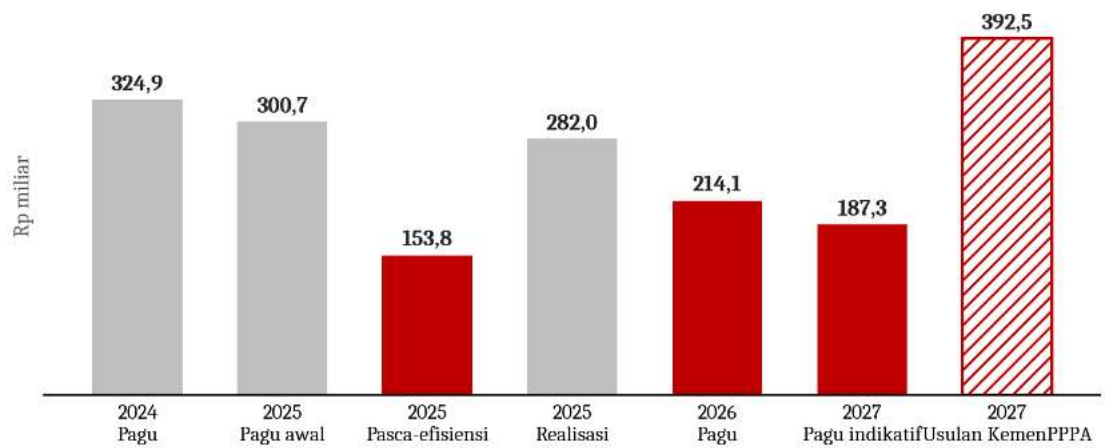
Lampiran

Gambar 1. Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (2013–2025)



Sumber: CATAHU Komnas Perempuan (2013–2025)

Gambar 2. Anggaran KemenPPPA, 2024–2027 (Rp miliar)



Sumber: Nota Keuangan APBN 2025; LKj KemenPPPA 2024; RDP/Raker Komisi VIII DPR RI (28 Jan dan 17 Jun 2026); Nota Keuangan RAPBN 2027

IV. Evaluasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Membesarnya TNI-Polri, Menguatkan Pertahanan dan Keamanan?²⁴

Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan paradoks pembangunan sektor pertahanan dan keamanan: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) makin besar dan makin banyak menjalankan tugas di luar fungsi utamanya, tetapi kemampuan inti keduanya tidak ikut menguat. Di tengah kebutuhan modernisasi pertahanan dan penanganan kriminalitas yang masih mendesak, perluasan peran aparat justru semakin jauh menjangkau urusan pembangunan dan kehidupan sipil.

Makin besar, belum makin kuat

Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) mencapai Rp187,10 triliun pada 2026 dan meningkat menjadi Rp189,01 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang disahkan DPR pada 29 September 2026. Namun, peningkatan anggaran tersebut perlu dinilai dari ketepatan penggunaannya, termasuk kesesuaian pengadaan alutsista dengan perencanaan strategis pertahanan. Pada Juni 2023, Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan memaparkan Perisai Trisula Nusantara (PTN), tetapi dokumen perencanaannya tidak dipublikasikan. Dasbor alutsista LAB 45 (defensedatabase.lab45.id) mencatat pengadaan di luar rencana itu, misalnya 48 jet tempur KAA dan kapal induk ringan eks-Garibaldi. Sebaliknya, kebutuhan yang direncanakan, seperti pesawat peringatan dini (AEW&C) dan pengganti 36 jet tempur F-15, belum memiliki kontrak.

Perluasan struktur TNI juga membawa konsekuensi beban anggaran. Dalam rentang Agustus 2025 hingga Oktober 2026 ini, Prabowo meresmikan 366 satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk 12 Komando Daerah Militer (Kodam) dan 250 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Model LAB 45 memperkirakan gaji prajurit dan pembangunan markas Yonif TP 2026–2029 sekitar Rp127–222 triliun. TNI AD menyebut langkah ini penguatan teritorial. Padahal bila melihat Penjelasan Pasal 11 UU TNI, penggelaran kekuatan militer tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan, sementara banyak Kodam baru dibentuk mengikuti wilayah provinsi.

Pada Polri, anggaran Polri direncanakan turun dari Rp146,05 triliun (2026) menjadi Rp139,19 triliun (APBN 2027). Namun, prioritas belanjanya masih timpang. Di luar dukungan manajemen, modernisasi almatsus dan sarana prasarana tetap mendapat alokasi terbesar (Rp48,41 triliun pada 2027), jauh melampaui anggaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Rp12,80 triliun) serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Rp3,48 triliun). Kesenjangan ini perlu dicermati di tengah masih besarnya tantangan keamanan dalam negeri dan lemahnya penegakan hukum yang turut diidentifikasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

Sibuk di luar fungsi

Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) 2025–2029 menargetkan modernisasi TNI melalui pembaruan alutsista, interoperabilitas antarmatra, dan penguasaan teknologi

²⁴ Disiapkan oleh Tim Politik, Hukum, dan Keamanan LAB 45 (Narahubung: Winda Safitri, winda@lab45.id).

peperangan, tetapi sekaligus mengakomodasi satuan produksi pangan dan konstruksi. Orientasi ini tercermin dalam Yonif TP yang memiliki kompi pertanian, peternakan, kesehatan, dan zeni, serta keterlibatan tiga matra TNI dalam produksi padi, kedelai, dan tebu. TNI juga dilibatkan bersama PT Agrinas Pangan Nusantara dalam pembangunan 83.380 gerai dan gudang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Padahal, Pasal 7 ayat (3) UU No. 3/2002 menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama menghadapi ancaman nonmiliter.

Pola serupa terlihat pada Polri melalui keterlibatannya dalam ketahanan pangan, khususnya produksi jagung, dan pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga September 2026, Polri telah mengembangkan 1.502 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 841 unit beroperasi. Revisi UU Polri No. 5/2026 membuka ruang perluasan mandat tersebut. Pasal 14 ayat (1) huruf m memungkinkan penugasan kepolisian berdasarkan kebijakan Presiden untuk kepentingan strategis nasional. Ketentuan ini sejatinya berisiko menjadi dasar perluasan tugas Polri yang mengikuti prioritas politik Presiden, tanpa ukuran kebutuhan keamanan yang jelas.

Warga yang menanggung

Perluasan peran TNI membawa risiko militerisme dalam kehidupan sipil. Sepanjang 2026, 3.838 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti latihan dasar Komponen Cadangan, sementara lima calon pengelola koperasi dan kampung nelayan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan Kemhan. Pada 12 Maret 2026, aktivis KontraS Andrie Yunus disiram air keras oleh empat prajurit Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, yang divonis bersalah oleh Pengadilan Militer pada Juni 2026. Kasus ini memperkuat kekhawatiran bahwa aparat pertahanan dapat disalahgunakan untuk mengawasi dinamika sosial-politik dan mengintimidasi warga sipil atas nama keamanan negara.

Di sisi kepolisian, persoalan hukum dan keamanan dalam negeri masih membutuhkan perhatian serius. Pusiknas Polri mencatat 311.832 perkara kejahatan sepanjang semester I 2026, meningkat 8,3% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Di tengah tingginya angka kriminalitas, penanganan keamanan domestik turut melibatkan kekuatan di luar Polri. Pada Mei 2026, Polda Metro Jaya membentuk Tim Pemburu Begal, sementara Kodam Jaya mengerahkan batalyon tempur untuk mendukung patroli keamanan. TNI juga dilibatkan dalam pengamanan demonstrasi pada Juni dan Agustus 2026. Di luar aparat negara, GRIB Jaya hadir dalam kericuhan pascademonstrasi 27 Agustus 2026 dengan klaim pengamanan swakarsa, padahal kelompok informal tidak berwenang menindak massa. Pola ini berisiko menjadikan pengerahan kekuatan di luar Polri sebagai jalan pintas keamanan, sementara persoalan kapasitas kepolisian tetap tidak terjawab.

Rekomendasi

LAB 45 merekomendasikan pemerintah untuk:

1. menunda pembentukan Kodam dan Yonif TP baru hingga kebutuhan operasional dan beban anggarannya dievaluasi, mempublikasikan bagian dokumen Perisai Trisula Nusantara yang dapat dibuka kepada publik, serta memprioritaskan pengadaan alutsista yang sudah direncanakan sebelum menambah pembelian di luar rencana;
2. mengevaluasi pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan menghentikan penugasan baru TNI-Polri dalam program pembangunan nonpertahanan, seperti KDMP,

produksi pangan, dan dapur MBG, serta mengalihkan kegiatan yang sudah berjalan secara bertahap kepada instansi sipil agar kedua institusi dapat memusatkan sumber dayanya pada fungsi utama masing-masing;

3. menghentikan pengerahan pasukan TNI untuk menangani kriminalitas dan demonstrasi, menindak kelompok informal yang mengambil alih kewenangan pengamanan, serta meningkatkan prioritas anggaran Polri untuk pencegahan kejahatan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana; dan
4. memastikan penyusunan kebijakan dan produk legislasi pertahanan dan keamanan ke depan didasarkan pada kebutuhan keamanan yang nyata, serta pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini termasuk pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, serta penyelesaian revisi UU Peradilan Militer bersama DPR dalam tenggat dua tahun yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Lampiran

Tabel 1. Anggaran Fungsi Pertahanan, Kemhan, dan Polri, 2025–2027 (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Fungsi Pertahanan (pagu)	Fungsi Pertahanan (realisasi)	Kemhan (pagu)	Kemhan (realisasi)	Polri (pagu)	Polri (realisasi)
2025	166,05	348,58	166,26	348,94	126,62	145,30
2026	335,30	299,10 (outlook)	187,10	-	146,05	-
2027 (RAPBN)	329,50	-	189,01	-	139,19	-

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 2. Pengadaan Alutsista Dibandingkan Rencana Perisai Trisula Nusantara (PTN)

Kelompok	Sistem	Status (diterima/dipesan, tahun kontrak)
Di luar rencana PTN	TAI KAAAN (jet tempur)	Dipesan, 0/48, 2025
Di luar rencana PTN	Fregat kelas Istif	Dipesan, 0/2, 2025
Di luar rencana PTN	KRI Sriwijaya-100 (eks-Giuseppe Garibaldi, hibah)	Aktif, 1/1, 2024
Di luar rencana PTN	Fregat kelas Brawijaya (eks-Thaon di Revel)	Aktif, 2/2, 2024
Di luar rencana PTN	AAV-7A1 (kendaraan amfibi)	Dalam pengiriman, 12/35, 2026
Di luar rencana PTN	Leonardo M-346F Block 20	Dipesan, 0/12, 2026
Di luar rencana PTN	Airbus H145	Dipesan, 0/4, 2024
Di luar rencana PTN	Sikorsky S-70M Black Hawk	Dipesan, 0/24, 2023
Di luar rencana PTN	Airbus A330 MRTT	Dipesan, 0/2, 2023
Target PTN, terpenuhi sebagian	Fregat Merah Putih	2 sedang dibangun; 10 dari 12 target belum ada
Target PTN, terpenuhi sebagian	Kapal selam taktis	3 dari 7 masih dibutuhkan
Target PTN, terpenuhi sebagian	Baterai rudal BrahMos	Target 8; kontrak Juli 2026, jumlah tidak diungkap
Target PTN, terpenuhi sebagian	Kapal penyelamat kapal selam (DSRV)	2 dikontrak, belum diterima
Target PTN, belum ada pengadaan	Jet tempur berat F-15 (36 unit)	Boeing mundur pada 2026, pengganti belum ada
Target PTN, belum ada pengadaan	Pesawat peringatan dini AEW&C (1 unit)	US\$800 juta dianggarkan, platform belum dipilih

Sumber: Dasbor alutsista LAB 45, defensedatabase.lab45.id (diakses 19 Oktober 2026).

Catatan: Rencana PTN mengacu pada paparan 16 Juni 2023 (Siaran Ulang KompasTV). "Di luar rencana" berarti tidak disebut dalam paparan itu. Pengadaan tahun 2023–2024 dikontrak saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Daftar ini pilihan; daftar lengkap ada di dasbor.

Catatan Metodologi: Estimasi Biaya Yonif TP 2026–2029

Estimasi ini dihitung LAB 45 untuk 2026–2029. Targetnya 750 batalyon pada 2029 dari 105 yang ada per November 2025 (Kadispenad), dibentuk merata: 161 batalyon per tahun, 162 pada 2029. Tiap batalyon dihitung berisi 1.190 prajurit, struktur penuh menurut Menhan di Komisi I DPR (19 Mei 2026), atau 691 prajurit sesuai temuan lapangan di Papua. Gaji dihitung Rp6 juta per prajurit per bulan, yang disebut Menhan sebagai gaji terendah prajurit, selama 12 bulan. Markas dihitung Rp40 miliar per batalyon baru, dari dua kontrak pembangunan Kemhan, atau Rp75 miliar, perkiraan LAB 45 dari wawancara lapangan yang disesuaikan untuk wilayah luar Jawa. Tidak dihitung: peralatan organik, lahan, latihan, pemeliharaan, gaji ke-13 dan ke-14, serta inflasi. Ini estimasi biaya kotor LAB 45, yaitu seluruh prajurit dihitung penuh, dan bukan angka resmi karena Kemhan belum mempublikasikan biaya per batalyon.

Tentang Laboratorium Indonesia 2045

Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.

Konsentrasi riset LAB 45 adalah berbagai perkembangan seputar politik media, ekonomi politik, gender, serta politik, hukum, dan keamanan. Topik-topik dalam studi politik, hukum, dan keamanan meliputi politik konstituen, politik luar negeri, strategi pertahanan, keamanan maritim, radikalisme dan separatisme. Ruang lingkup kajian ekonomi politik antara lain blok perdagangan, liberalisasi ekonomi, politik fiskal dan moneter, kemaritiman, pembangunan berkelanjutan, serta peran badan usaha milik negara. LAB 45 juga membangun kapasitas dan kolaborasi dengan komunitas epistemik yang memiliki perhatian terhadap perkembangan global dan nasional.

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Sekretariat LAB 45

Telepon: +62 811 4520 45

Email: lab45@lab45.id

Website: www.lab45.id

Instagram: [lab45.id](https://www.instagram.com/lab45.id)

Facebook: Laboratorium Indonesia 2045

X: [@lab45](https://x.com/lab45)